

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tg. P. (ex. 30265) 7767190 Ciamis 46274

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 0042/35/SK/AK/D/IV/2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BIMBINGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS GALUH,

Menimbang : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh, perlu dilakukan penyusunan Skripsi.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nasol Kecamatan Cikongkeng Kabupaten Ciamis Universitas Galuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor: 416/4123/SK/AK/R/IX/2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memperpanjang masa bimbingan skripsi untuk mahasiswa di bawah ini :
Nama : Pebr Nur Ibrahim
NIM : 3506170116
Sebagai peserta bimbingan skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2022/2023, dengan judul skripsi :
"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nasol Kecamatan Cikongkeng Kabupaten Ciamis"

Kedua : Mahasiswa tersebut pada butir Kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan skripsi dibimbing oleh :
1. Hj. Kiki Endah, S.Sos.,M.Si., sebagai pembimbing I
2. R. Rindu Garvera, S.IP.,M.Si., sebagai pembimbing II

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.


Ciamis
11 April 2023
Dekan
H. Cecep Cahya Susena, S.H., M.H., M.Si.,
NKG-311277009

lampiran : Surat Keputusan Perpanjangan Bimbingan



UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 0164/35/SK/AK/D/VII/2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BIMBINGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS GALUH,

Menimbang : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh, perlu dilakukan penyusunan Skripsi;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor: 416/4123/SK/AK/R/DX/2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memperpanjang masa bimbingan skripsi untuk mahasiswa di bawah ini :
Nama : Pebril Nur Ibrahim
NIM : 3506170116
Sebagai peserta bimbingan skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2022/2023, dengan judul skripsi :
"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nasoi Kecamatan Cikongeng Kabupaten Ciamis"

Kedua : Mahasiswa tersebut pada butir Kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan skripsi dibimbing oleh :
1. Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si., sebagai pembimbing I
2. R. Rindu Garvera, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing II

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

: Ciamis
4 Juli 2023
M. Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si., V.
NIDN. 042417001

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS GALUH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
 Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax : (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0252/35/SP/AK/DI/V/2023 Ciamis, 2 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
 di
 Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Pebel Nur Ibrahim
 NIM : 3506170116
 Semester : IV/VIII
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan izin penelitian di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

I. Arsip

Lampiran 3 : Surat Ijin Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN CIKONENG
KEPALA DESA NASOL

Jl. A. Natadisastra No. 110 ■ 773339 Kode Pos 46261 Ciamis

<p>Nomor : 895.4/388-Ds./Um Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan Penelitian</p>	<p style="text-align: right;">Nasol, 25 Mei 2023 Kepada Yth. Dekan FISIP Universitas Galuh Ciamis di Ciamis</p>
---	--

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis menerangkan:

Nama	: PEBRI NUR IBRAHIM
NIM	: 3506170116
Alamat	: Dusun Desa RT. 009 RW. 003 Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Berdasarkan surat dari Unifersitas Galuh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 0252/35/SP/AK/DI/V/2023 perihal permohonan izin penelitian dengan judul **"Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis"**.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Pemerintah Desa Nasol memberikan izin kepada orang tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian diwilayah Desa Nasol.

Demikian, agar kepada pihak yang bersangkutan maklum.



DARSYANTO, S.Pd

Lampiran 4 : Berita Acara Wawancara**BERITA ACARA WAWANCARA**

Telah dilaksanakan wawancara berkaitan dengan peneliti untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NASOL KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS** “.

Wawancara dilaksanakan kepada beberapa informan sebagai berikut :

No.	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Senin, 13 November 2023	Rumah Informan	Darisyanto, S.Pd	Kepala Desa
2.	Selasa, 14 November 2023	Rumah Informan	Hari Kurniawan, S.H	Direktur BUMDes
3.	Kamis, 16 November 2023	Rumah/Kios Informan	Rubiyanto	Sekretaris BUMDes
4.	Rabu, 15 November 2023	Rumah Informan	Dimas Yanuar Akbar, S.H	Manager Operasional
5.	Selasa, 14 November 2023	Kantor Desa Nasol	Abdul Latif	Sekertaris Desa
6.	Jumat, 17 November 2023	Rumah Informan	Adi Rahayu	Tokoh masyarakat
7.	Sabtu, 18 November 2023	Rumah Informan	Asep Manarul Hidayat	Tokoh Masyarakat

Ciamis, November 2023

Pebri Nur Ibrahim

Lampiran 5 : Pedoman Observasi**PEDOMAN OBSERVASI**

Hari/Tanggal	:	
Tempat	:	
Waktu	:	

No.	Objek yang diamati	Hasil Observasi
1.	Profil Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis	
2.	Pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki	
3.	Pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes	
4.	Pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang	
5.	Pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes	
6.	Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes	
7.	Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes	
8.	Pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar	
9.	Pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat	
10.	Pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat	
11.	Pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat	

Lampiran 6: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA NASOL KECAMATAN CIKONENG
KABUPATEN CIAMIS

I. IDENTITAS INFORMAN

No. Informan :
 Jabatan :
 Pendidikan :
 Jenis Kelamin :
 Usia :

II. PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kooperatif, dengan indikator :
 - a. Pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki :
 1. Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?
2. Partisipatif, dengan indikator :
 - a. Pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes :
 1. Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?

2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?
- b. Pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang :
1. Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?
3. Emansipatif, dengan indikator :
- a. Pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes :
 1. Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?
 - b. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes :

1. Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?
4. Transparan, dengan indikator :
- a. Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes :
 1. Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?
 - b. Pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar :
 1. Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?

5. Akuntabel, dengan indikator :
 - a. Pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat :
 1. Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?
6. Berkelanjutan, dengan indikator :
 - a. Pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat :
 1. Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?
 2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?
 3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?
 - b. Pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat :
 1. Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

2. Hambatan apa yang diterima oleh pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

Lampiran 7, Transkrip Wawancara**Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 1**

Nama Informan : Darisyanto. S.Pd
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk usaha yang dimiliki ?	<p>Jadi menurut kami dalam memberikan dukungan anggaran dalam masalah permodalan dalam pengelolaan BUMDes menjadi masalah utama, dimana terkadang BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena memang kurang memiliki dukungan permodalan yang kuat.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan dikarenakan salah satu permodalan BUMDes berasal dari penyertaan modal yang diberikan pemerintah desa namun memang tidak besar sedangkan pengelola BUMDes kurang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi masalah permodalannya.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu dalam mengatasi masalah tersebut seperti dengan menjalin kerjasama dengan</p>

		berbagai pihak sehingga kegiatan usaha BUMDes lebih berkembang.
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?	<p>Sebenarnya untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes bukan berarti masyarakat turut campur secara mendalam dalam pengelolaan BUMDes tetapi diharapkan masyarakat turut serta memberikan saran dan masukan dalam musyawarah perencanaan, penentuan unit usaha dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sehingga pengelolaan BUMDes tidak menyimpang.</p> <p>Hambatan yang terjadi di lapangan dikarenakan masih adanya sebagian masyarakat yang memang kurang peduli terhadap keberadaan BUMDes apalagi untuk turut serta mengelola dan adalagi sebagian masyarakat yang mengetahui keberadaan BUMDes tetapi memang kurang tertarik untuk turut serta secara langsung karena adanya anggapan dengan adanya BUMDes tidak terpengaruh terhadap masyarakat secara umum.</p> <p>Upaya yang di lakukan oleh pemerintah desa, yaitu dalam setiap forum musyawarah memberikan</p>

		arahan dan pemahaman terhadap semua elemen masyarakat di desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengelolaan usaha BUMDes agar menjadi penyeimbang dan dapat memberikan saran serta masukan tentang keinginan dan harapan masyarakat terhadap keberadaan usaha BUMDes di desa.
3.	Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?	Ya memang dalam pengelolaan usaha BUMDes tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha BUMDes, sehingga dapat mengelola usahanya sesuai dengan kebutuhannya, dan sebenarnya anggaran berupa modal awal untuk pengelolaan BUMDes salah satunya berasal dari APBDes. Hambatan yang terjadi dilapangan terutama terhadap kemampuan dan pemahaman dari pengurus BUMDes untuk menyusun rencana anggaran biaya sebagai modal awal untuk mengelola usaha BUMDes selama satu tahun kedepan, dan hal ini akan menghambat untuk mencarikan tambahan modal kepada pihak ketiga.
4.	Bagaimana pemerintah desa	Pemerintah desa telah meminta

	meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?	semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes melalui kegiatan sosialisai terhadap unit usaha BUMDes hal ini sangat penting dilakukan sehingga butuh keseriusan dari pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi terhadap keberadaan BUMDes sehingga semua komponen dapat ikut terlibat dalam pengembangan BUMDes.
5.	Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?	Pelaksanaan sosialisai terhadap pengelolaan unit usaha BUMDes bukanlah hal yang mudah karena butuh keseriusan dari aparatur perangkat desa dan para pengurus BUMDes untuk melakukan sosialisasi sehingga informasi tentang pengelolaan unit usaha BUMDes dapat tersampaikan secara jelas dan terperinci terhadap semua elemen masyarakat desa.
6.	Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?	Ya, memang masa sekarang ini dihadapkan dengan jaman keterbukaan sehingga semua elemen mengharapkan adanya keterbukaan begitupula dalam pengembangan BUMDes, maka peran pemerintah desa secara terbuka menyampaikan kepada

		masyarakat tentang usaha BUMDes tentu dapat menunjang perkembangan usaha yang dijalankan.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Selama ini pemerintah desa telah membangun relasi yang baik dengan masyarakat sehingga pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan dasar masyarakat di desa. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam penentuan jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes karena memang selama ini pemerintah desa merencanakan penyusunan kegiatan usaha didasarkan pada kebutuhan dasar masyarakat. Hambatan yang terjadi dilapangan memang belum sepenuhnya usaha yang dipilih dapat memenuhi semua masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya dukungan permodalan yang dimiliki sehingga tidak dapat membuka usaha yang banyak untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan kedepannya diharapkan dengan dukungan masyarakat BUMDes dapat membuka usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?</p>	<p>Pemerintah desa telah meminta pengurus BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan BUMDes yang dilaksanakan pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT) yang terdiri dari masyarakat dengan musyawarah desa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui kegiatan BUMDes selama 1 tahun. Dalam pertanggungjawaban yang disampaikan oleh BUMDes tentunya semua pihak dapat mengetahui aspek-aspek termasuk keuangan maupun jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes sehingga hal ini dapat memberikan berbagai masukan kepada BUMDes terhadap pengelolaan BUMDes. Hambatan yang diterima oleh pemerintah desa yaitu kurang jelasnya laporan keuangan secara jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui penggunaan penyertaan modal yang diperoleh dari pemerintah desa kepada BUMDes.</p>
9.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi</p>	<p>Pemerintah desa telah meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat dengan cara</p>

	masyarakat ?	<p>mendorong usaha kreatif bertumbuh sehingga dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Nasol.</p> <p>Hambatan yang ditemui dilapangan BUMDes belum dapat secara optimal mewujudkan harapan tersebut karena keterbatasan modal yang ada sehingga belum dapat memberikan modal bagi para pelaku usaha secara optimal.</p> <p>Upaya yang dilakukan menghadapi hambatan pemerintah desa melakukan penambahan permodalan untuk kebutuhan pengelolaan BUMDes supaya memberikan modal bagi para masyarakat yang ingin malakukan usaha secara optimal.</p>
10.	Bagaimana pemeritah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	<p>Potensi yang dimiliki oleh desa Nasol dominan berada pada sektor pertanian. BUMDes dapat memanfaatkan potensi desa tersebut untuk membangun unit usaha. Akan tetapi, BUMDes hanya mampu membangun unit usaha perdagangan karena jumlah modal yang diperoleh sangat minim jika digunakan untuk membangun unit usaha yang besar.</p>

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 2

Nama Informan : Abdul Latif
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Desa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	<p>Ya memang dari awal harus didukung dengan modal yang dimiliki sehingga dapat mempermudah dalam mengembangkan usaha BUMDes dan hal ini perlu kepiawaian dari pengurus untuk melakukan kerjasama usaha dengan para pelaku usaha sehingga dengan modal yang terbatas namun dapat mengembangkan usaha lebih berkembang.</p> <p>Hambatan yang ditemui dilapangan yaitu masih kurangnya pemahaman dari beberapa pengurus BUMDes dalam melakukan kerjasama usaha dengan berbagai pihak sehingga pemerintah desa telah mendorong pengelola BUMDes dapat bekerjasama dengan berbagai pihak supaya dapat memperoleh tambahan modal.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu semua pengurus BUMDes diharuskan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes secara konsisten dalam mengembangkan usaha agar dapat menarik minat pihak tertentu.</p>
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes merupakan hal yang penting,

	<p>berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?</p>	<p>dimana pengelolaan BUMDes memang tujuannya selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa maka perlu saran, masukan dari masyarakat sehingga keinginan dan harapan masyarakat dapat terakomodir dalam pengelolaan BUMDes.</p> <p>Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan terutama datang dari masyarakatnya itu sendiri, karena yang terlihat masih banyak diantara masyarakat desa yang kurang tertarik untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, hal ini di karenakan kurangnya keterbukaan dari pengurus BUMDes sehingga kurang mampu merangkul berbagai elemen masyarakat di desa, dan hal ini akan mempersulit untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.</p> <p>Upaya yang di lakukan yaitu pimpinan di desa sudah menekankan terhadap para pengurus BUMDes agar melakukan interaksi secara langsung dan terbuka dengan masyarakat desa agar dapat memberikan pemahaman dan merangkul semua elemen di desa untuk peduli dan tertarik untuk berpartisipasi secara langsung. dalam pengelolaan BUMDes sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat dalam pengelolaan.</p>
--	---	--

3.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?</p>	<p>Sebenarnya sumber anggaran untuk pengelolaan BUMDes sudah tersedia dari berbagai sumber, baik dari APBDes, maupun dari dana desa yang sekarang dapat dipergunakan untuk anggaran pengelolaan BUMDes.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan memang jumlahnya relatif kecil sehingga belum dapat mengembangkan usaha BUMDes lebih berkembang sehingga kedepan perlu adanya kegiatan usaha BUMDes.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat membantu permasalahan permodalan BUMDes.</p>
4.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>Pemerintah desa telah meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes, mengingat pada saat ini belum semua masyarakat desa mengetahui tentang keberadaan usaha BUMDes, seperti bagi masyarakat dari Dusun terjauh kemungkinan besar belum mengetahui keberadaan usaha BUMDes di desa.</p> <p>Hambatan dilapangan masih kurangnya perhatian dari pengurus BUMDesnya itu sendiri.</p> <p>Upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa di berbagai Dusun untuk mensosialisasikan pengelolaan usaha BUMDes sehingga</p>

		minimal masyarakat dapat mengetahuinya dan secara lebih jauhnya masyarakat desa dapat memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan BUMDes.
5.	Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?	<p>Sosialisasi mengenai pengelolaan unit usaha BUMDes sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat belum semua masyarakat desa mengetahui tentang keberadaan usaha BUMDes, seperti bagimasyarakat dari Dusun terjauh kemungkinan besar belum mengetahui keberadaan usaha BUMDes di desa.</p> <p>Hambatan, terutama dari faktor perhatian dari pengurus BUMDes nya itu sendiri yang terkadang kurang mementingkan untuk melakukan sosialisasi mengenai unit usaha BUMDes terhadap masyarakat.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu pemerintah desa sudah memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa di berbagai Dusun untuk mensosialisasikan pengelolaan usaha BUMDes sehingga minimal masyarakat dapat mengetahuinya dan secara lebih jauhnya masyarakat desa dapat memberikan saran dan masukan terhadap pengelolaan BUMDes</p>
6.	Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes	Ya, memang dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan usaha BUMDes secara langsung dapat memberikan akses terhadap semua elemen di desa untuk mengakses dan

	?	memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan usaha BUMDes.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Pemerintah desa telah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat karena pada hakekatnya keberadaan BUMDes memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah desa harus mengetahui kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dengan membangun relasi yang baik sehingga pemerintah desa dapat memberikan masukan kepada BUMDes dalam menentukan jenis usaha yang dipilih.
8.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?	Pemerintah desa telah meminta pengurus BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan BUMDes yang dilaksanakan pada saat Rapat Akhir Tahun (RAT) yang terdiri dari masyarakat dengan musyawarah desa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui kegiatan BUMDes selama 1 tahun. Dalam pertanggungjawaban yang disampaikan oleh BUMDes tentunya semua pihak dapat mengetahui aspek-aspek termasuk keuangan maupun jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes sehingga hal ini dapat memberikan berbagai masukan kepada BUMDes terhadap pengelolaan.

9.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?</p>	<p>Walaupun Pemerintah desa telah meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.</p> <p>Hambatan yang ditemui BUMDes belum dapat melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa hal ini disebabkan oleh kurangnya BUMDes dalam membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.</p> <p>Upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu dengan upaya meningkatkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan daya tarik usaha BUMDes dan serta mencakup penggunaan media sosial, promosi lokal.</p>
10.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?</p>	<p>Dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa BUMDes tak lepas dari program-program yang diberikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan dalam pengelolaannya BUMDes juga tidak terlepas dari pengawasan Kepala Desa. Sebelum melakukan pengelolaan tentunya harus ada potensi yang bisa dimanfaatkan di desanya.</p>

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 3

Nama Informan : Hari Kurniawan S.H
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Direktur BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	<p>Sebenarnya selama ini para pengurus BUMDes sudah mulai menjajagi peluang kerjasama dengan berbagai pihak karena memang dukungan pemerintah desa dalam melakukan penyertaan modal masih relative kecil sehingga belum dapat mengembangkan BUMDes secara optimal.</p> <p>Hambatan yang ditemui dilapangan selama ini dikarenakan pengelolaan BUMDes masih dipandang sebelah mata keberadaannya.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu di lapangan sudah dilakukan beberapa usaha diantaranya dengan memperlihatkan profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes dalam dunia usaha sehingga dapat membangun kepercayaan dari berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dengan membantu permodalan BUMDes.</p>
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?	<p>Mengenai partisipasi masyarakat memang penting sehingga perlu adanya perhatian dan kepedulian dari semua elemen masyarakat di desa karena walaupun tidak berpengaruh secara pribadi tetapi dengan adanya pengelolaan usaha BUMDes yang bertujuan</p>

		<p>untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian di sekitar desa</p> <p>Hambatan yang terjadi di lapangan dikarenakan faktor dari beberapa elemen kelompok masyarakat yang kurang peduli dan kurang perhatian terhadap pengelolaan BUMDes sehingga kurang tertarik untuk turut serta secara langsung untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu bersama dengan para pengurus BUMDes berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat untuk melakukan pertemuan membahas pengelolaan BUMDes sehingga dapat menarik minat dari semua elemen masyarakat di desa untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan usaha BUMDes.</p>
3.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?</p>	<p>Ya, memang anggaran untuk pengelolaan unit usaha BUMDes sudah di anggarkan dalam APBDDes tinggal mengajukan besaran yang akan di anggarkan untuk keperluan modal unit usaha BUMDes yang sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan dikarenakan kurang terbukaan dari pengelola BUMDes terhadap kebutuhan modal sehingga menyulitkan pihak ketiga</p>

		<p>dalam mengalokasikan kebutuhan BUMDes. Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah desa meminta BUMDes untuk menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga dapat digunakan oleh pihak ketiga dalam melakukan analisis peluang usaha BUMDes sehingga dapat menginvestasikan uangnya di BUMDes.</p>
4.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>Sebenarnya Pemerintah desa telah meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes yaitu dengan dilakukan sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes dengan mengundang pengurus RT/RW, Dusun dan terhadap organisasi kemasyarakatan di desa, seperti kader PKK, kader Posyandu dan terhadap organisasi Karang Taruna dan masyarakat secara umum.</p> <p>Hambatan yang terjadi terutama terhadap kesadaran dan perhatian dari masyarakat untuk menghadirinya sehingga yang hadir hanya yang biasa aktif saja sedangkan yang lainnya masih kurang tertarik untuk mengikutinya.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh semua pengurus BUMDes, yaitu dengan melakukan pendekatan secara santai dalam dalam dalam kumpulan masyarakat yang tidak formal untuk mensosialisasikan keberadaan usaha BUMDes sambil mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat mengenai</p>

		<p>pengelolaan usaha BUMDes di desa, seperti berkumpul dengan pemuda karang taruna atau di saat berkumpul dengan para pengurus Rt/Rw agar dapat di sampaikan terhadap warganya, dan hal itu akan lebih efektif dibanding dengan mengundang secara formal.</p>
5.	<p>Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>Sosialisasi mengenai pengelolaan unit usaha BUMDes sangat penting untuk di laksanakan, mengingat belum semua masyarakat desa mengetahui tentang keberadaan usaha BUMDes, seperti bagimasyarakat dari Dusun terjauh kemungkinan besar belum mengetahui keberadaan usaha BUMDes di desa.</p> <p>Hambatan, terutama dari faktor perhatian dari pengurus BUMDes nya itu sendiri yang terkadang kurang mementingkan untuk melakukan sosialisasi mengenai unit usaha BUMDes terhadap masyarakat.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu pemerintah desa sudah memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa di berbagai Dusun untuk mensosialisasikan pengelolaan usaha BUMDes sehingga minimal masyarakat dapat mengetahuinya dan secara lebih jauhnya masyarakat desa dapat memberikan saran dan masukan terhadap pengeloaan BUMDes</p>
6.	<p>Bagaimana pemerintah desa</p>	<p>Pada dasarnya memang konsep keterbukaan</p>

<p>terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>dalam mengembangkan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes sangat penting, selain untuk kepentingan publik juga merupakan kepentingan bagi usaha BUMDes nya sendiri karena akan lebih meningkatkan kepercayaan karena adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan sampai dengan laporan keuangan. Dan hal ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh para pengurus BUMDes dengan melakukan tata kelola terhadap dokumen dan administrasi untuk kepentingan tertib administrasi unit usaha BUMDes sampai dengan penyampaian informasi, laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan karena hal ini sangat penting untuk diketahui oleh semua elemen masyarakat di desa. Dengan demikian untuk pelaksanaan di lapangan tinggal penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum tersampaikan secara jelas dan terperinci karena memang masih adanya beberapa administrasi yang belum terselesaikan, selain itu ke depannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis internet, maka pengurus sedang mengusahakan agar dapat di akses melalui Website khusus yang menayangkan segala informasi tentang BUMDes sehingga dapat mempermudah terhadap masyarakat desa untuk mengetahuinya</p>
---	--

7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Pemerintah desa telah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hal ini dikarenakan pemerintah desa telah memberikan masukan-masukan kepada pengelola BUMDes dalam menentukan jenis-jenis usaha yang dapat dipertimbangkan oleh BUMDes.
8.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?	Pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat merupakan tuntutan undang-undang karena kegiatan usaha BUMDes memperoleh bantuan penyertaan modal dari pemerintah desa dan masyarakat sehingga pengelola harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada semua pihak secara terbuka selain itu dalam kesempatan tersebut BUMDes dapat menyampaikan permasalahannya sehingga dapat memperoleh dukungan dari semua pihak.
9.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?	Pemerintah desa walaupun telah meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat namun BUMDes kesulitan untuk mewujudkannya hal ini tidak lepas dari dukungan permodalan yang dimiliki serta masih banyaknya permasalahan terkait dengan usaha simpan pinjam sehingga BUMDes belum berani menanggung resiko dari kegiatan simpan pinjam tersebut.

10.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	BUMDes memanfaatkan setiap potensi yang ada di desanya dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, pihak BUMDes juga menyediakan penyewaan alat bangunan dan alat pertanian agar memudahkan masyarakat dalam mengelola kebunnya.
-----	---	---

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 4

Nama Informan : Dimas Akbar Yanuar S.H
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Manager Operasional

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	<p>Sebenarnya selama ini sudah berusaha untuk memaksimalkan peluang sekecil mungkin untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak sehingga dapat menambah permodalan BUMDes mengingat kita tidak bisa mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah desa yang relative kecil jumlahnya.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan dikarenakan selama ini pengelolaan BUMDes masih dipandang sebelah mata dan keberadaannya memang masih diragukan.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh pimpinan dan semua pengurus BUMDes untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan cara konsisten dalam mengembangkan usaha, sehingga diharapkan dapat menarik minat pihak ketiga dalam menanamkan modalnya di BUMDes.</p>
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes memang sulit untuk di tebak, karena dalam pelaksanaan di lapangan terlihat masih kurang padahal dalam

	BUMDes ?	<p>musyawarah terlihat banyak masyarakat yang menyatakan mendukung dan siap untuk berpartisipasi.</p> <p>Hambatan yang terjadi di lapangan dikarenakan sebagian elemen masyarakat yang memiliki kesibukannya pribadinya yang terkadang kurang mampu untuk membagi waktu, dan hal ini memang tidak dapat disalahkan.</p> <p>Upaya yang di lakukan oleh pimpinan BUMDes, yaitu dengan terbuka memberikan informasi terhadap semua elemen masyarakat mengenai pengelolaan masyarakat, jadi walaupun tidak secara langsung berpartisipasi tetapi minimal bisa mengetahui perkembangan dan dapat memberikan saran dan masukan serta dapat menyampaikan keinginan dan harapannya dalam setiap musyawarah mengenai BUMDes.</p>
3.	Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?	<p>Anggaran untuk pengelolaan unit usaha BUMDes sudah dialokasikan dari APBDes namun besarnya harus berdasarkan pengajuan rencana anggaran biaya untuk pengelolaan unit usaha BUMDes yang diajukan oleh para pengurus.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan dikarenakan kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terhadap besaran anggaran untuk kepentingan pengelolaan unit usaha BUMDes sehingga kesulitan untuk</p>

		<p>menyesuaikannya.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu sudah adanya koordinasi di tingkat pimpinan untuk membahas tentang alokasi anggaran untuk kepentingan pengelolaan unit usaha BUMDes sehingga dapat menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat dijadikan dasar pengajuan kebutuhan modal kepada pihak ketiga.</p>
4.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>Ya, memang sosialisasi mengenai keberadaan BUMDes untuk melakukan usahanya sangat penting agar mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat di desa, karena keberadaan BUMDes memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat di desa sehingga Pemerintah desa harus meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes.</p> <p>Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan masih adanya hambatan terutama terhadap perhatian dari sebagian masyarakat di desa terhadap keberadaan usaha BUMDes sehingga mempersulit untuk melakukan sosialisasi mengenai keberadaan dan pengelolaan usaha BUMDes di desa.</p> <p>Upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan merangkul para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di wilayah masing-masing agar dapat mengajak dan mempengaruhi agar tertarik untuk hadir</p>

		dalam kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan BUMDes karena hal ini sangat penting agar dapat menyampaikan keinginan dan harapan dalam pengelolaan BUMDes di desa.
5.	Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?	Sebenarnya sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes pernah dilakukan dengan mengundang pengurus Rt/Rw, Dusun dan terhadap organisasi kemasyarakatan di desa, seperti kader PKK, kader Posyandu dan terhadap organisasi Karang Taruna dan masyarakat secara umum.
6.	Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?	Sebenarnya dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha BUMDes selama ini para pengurus sudah berusaha untuk melakukan penataan terhadap segala dokumen dan admistrasi dalam pengelolaan usaha BUMDes agar lebih terbuka dan dapat di sampaikan secara jelas dan terperinci terhadap semua elemen masyarakat di desa.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Pemerintah desa telah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hal ini dikarenakan pemerintah telah menyampaikan usulan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan walaupun memang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan modal yang dimiliki. Hambatan yang terjadi dilapangan karena

		<p>keterbatasan modal yang dimiliki pemerintah desa.</p> <p>Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu pengelola BUMDes berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat walaupun secara bertahap.</p>
8.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?</p>	<p>Sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BUMDes salah satunya adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola BUMDes yaitu pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat sehingga setiap tahun pengelola BUMDes telah melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam musyawarah desa. Hal ini tentunya bermanfaat dalam mengembangkan BUMDes karena pemerintah desa dan masyarakat dapat mengetahui perjalanan BUMDes sehingga dapat membantu mengembangkan BUMDes.</p>
9.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?</p>	<p>BUMDes sudah berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapat pekerjaan dapat bekerja di BUMDes, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Nasol dengan memberikan lapangan pekerjaan.</p>

10.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	Potensi yang dimiliki oleh desa Nasol dominan berada pada sektor pertanian sehingga BUMDes memanfaatkan potensi desa tersebut untuk membangun unit usaha. Akan tetapi, BUMDes hanya mampu membangun unit usaha perdagangan karena jumlah modal yang diperoleh sangat minim jika digunakan untuk membangun unit usaha yang besar.
-----	---	--

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 5

Nama Informan : Rubiyanto
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Sekretaris BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	<p>Dalam pelaksanaan di lapangan memang perlu adanya pergaulan yang luas dengan semua pelaku di berbagai bidang usaha karena sangat bermanfaat untuk menjajagi kerjasama dalam bidang usaha sehingga ini akan menambah permodalan BUMDes.</p> <p>Hambatan yang ditemui selama ini modal usaha BUMdes masih terbatas karena hanya mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah desa.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu dengan meningkatkan hasil usaha BUMDes, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dapat di promosikan terhadap pihak ketiga agar dapat membantu permodalan BUMDes.</p>
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat penting karena merupakan kontrol sosial dalam pengelolaan BUMDes agar dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.</p> <p>Hambatan yang terjadi dikarenakan waktu yang berbenturan dengan kegiatan kesehariannya, dan hal itu sangat wajar jadi harus dapat saling memahami.</p>

		<p>Upaya dari pimpinan BUMDes dengan selalu konsisten menyampaikan informasi terkait dengan operasional kegiatan pengelolaan BUMDes, sehingga lambat laun dapat menarik simpati dari semua elemen masyarakat untuk tertarik untuk turut serta berpartisipasi dari mulai perencanaan, penentuan jenis usaha yang akan di laksanakan sampai dengan pengawasan dan evaluasi, karena hal ini sangat penting sebagai kontrol sosial dari masyarakat sehingga pengelolaan BUMDes tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.</p>
3.	<p>Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?</p>	<p>Mengenai anggaran untuk pengelolaan unit usaha BUMDes sudah disepakati berdasarkan musyawarah desa, dimana anggaran pengelolaan unit usaha BUMDes sudah dialokasikan dari APBDes.</p> <p>Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan masih adanya hambatan untuk memakai anggaran untuk kepentingan pengelolaan unit usaha BUMDes karena dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa berdasarkan ajuan dari pengurus dalam rencana anggaran biaya untuk kepentingan pengelolaan unit usaha BUMDes.</p> <p>Upaya yang dilakukan, yaitu bersama dengan pimpinan BUMDes berusaha menyusun rencana anggaran biaya untuk</p>

		kepentingan pengelolaan unit usaha BUMDes selama satu tahun kedepan yang di sesuaikan dengan kebutuhannya sehingga dapat diajukan kepada pihak ketiga untuk dapat memperoleh bantuan modal.
4.	Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?	<p>Pemerintah desa telah meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes karena memang tanpa dukungan semua komponen akan sulit kegiatan usaha BUMDes dapat berkembang sehingga peran serta semua komponen sangat penting dalam mengembangkan BUMDes.</p> <p>Hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, hal ini terlihat dari masih kurangnya apresiasi dari sebagian masyarakat di desa terhadap pengelolaan usaha BUMDes.</p> <p>Upaya dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes, yaitu dengan lebih gencar untuk melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes, dengan merangkul dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di desa untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan usaha BUMDes sehingga dapat tertarik untuk turut serta dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.</p>
5.	Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran	Kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan usaha BUMDes sebenarnya sudah dilaksanakan dalam berbagai kesempatan kegiatan di desa walaupun memang belum

	dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?	di lakukan secara merata di setiap dusun.
6.	Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?	Ya memang mengenai keterbukaan informasi terhadap masyarakat merupakan tuntutan jaman dan juga tuntutan dari pekerjaan sehingga harus di upayakan semaksimal mungkin karena hal ini merupakan tuntutan untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat secara keseluruhan terhadap kinerja dari pengurus BUMDes. Dan sebenarnya hal ini sudah tidak adanya hambatan karena memang sudah mulai di tata agar dapat tertib administrasi sehingga dapat menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan pengelolaan unit usaha BUMDes di desa.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Pemerintah desa telah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang disampaikan kepada BUMDes untuk dapat mempertimbangkan berbagai usaha yang dapat dipilih sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Nasol.
8.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada	Pengelola BUMDes telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat hal ini karena merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh BUMDes karena BUMDes memperoleh bantuan permodalan yang

	pemerintah desa dan masyarakat ?	berasal dari penyertaan modal dari pemerintah desa sehingga masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana tersebut. Selain itu melalui pertanggungjawaban tersebut maka BUMDes dapat menyampaikan permasalahannya yang diharapkan memperoleh dukungan dari pemerintah desa sehingga kegiatan usaha BUMDes lebih berkembang
9.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?	Peran yang diberikan BUMDes dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dari hampir 6 tahun berjalannya BUMDes hanya sebanyak beberapa orang saja masyarakat desa yang dapat bekerja di BUMDes mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.
10.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	Setiap organisasi selalu memiliki peran tersendiri didalam kehidupan bermasyarakat. BUMDes merupakan suatu wadah organisasi desa yang mengembangkan potensi agar bermanfaat bagi masyarakat desa. Dengan adanya badan usaha ini, pemerintah desa dapat dengan mudah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 6

Nama Informan : Adi Rahayu
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	Yang terlihat selama ini para pengurus BUMDes masih kurang familier dalam pergaulan dengan para pelaku usaha di desa, seperti kurang familier dengan para bandar hasil pertanian dan masih kurang familier dengan para pemasok atau distributor barang kelontongan sehingga kesulitan untuk membangun kerjasama jaringan pemasaran terhadap hasil pengelolaan usaha BUMDes, dan hal ini perlu adanya perhatian dari pimpinan desa dan pimpinan BUMDes
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?	<p>Terkadang masih kurangnya anggapan terhadap beberapa elemen masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes sehingga terkadang dapat menurunkan tingkat partisipasi dari masyarakat untuk turut serta secara langsung dalam pengelolaan usaha BUMDes</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan kurangnya perhatian dari pimpinan agar dapat merespon partisipasi dari masyarakat di desa.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu mengajak dan merangkul semua elemen masyarakat desa</p>

		untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan usaha BUMDes.
3.	Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?	<p>Anggaran untuk pengelolaan BUMDes di alokasikan dari APBDes sehingga harus di pergunakan secara optimal karena hal ini menyangkut dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan unit usaha yang di kelola oleh BUMDes, mengenai kecukupannya itu tergantung dari penyusunan rencana anggaran biaya yang harus di sesuaikan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa.</p> <p>Hambatan yang terjadi dilapangan karena masih kurangnya keterbukaan dari pengelolan BUMDes terhadap kebutuhan modal sehingga pihak ketiga tidak mengetahui besaran kebutuhan modal BUMDes</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah desa harus berupaya supaya pengelola BUMDes menyusun anggaran kebutuhan modal untuk dapat diajukan kepada pihak ketiga.</p>
4.	Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?	Pemerintah desa belum optimal dalam meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes hal ini dikarenakan kurangnya kedekatan dari para pengurus BUMDes dalam mempengaruhi keinginan dan kesadaran dari masyarakat

		<p>desa untuk turut serta dalam kegiatan pertemuan dan sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes.</p> <p>Hambatan yang diterima oleh pemerintah desa dilapangan hal ini masih kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha BUMDes, seperti kurangnya motivasi atau kesadaran dapat menyebabkan partisipasi yang rendah.</p> <p>Upaya dari pengurus BUMDes untuk turun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan interaksi agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat di desa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan usaha BUMDes.</p>
5.	<p>Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?</p>	<p>Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes yaitu dengan sosialisasi mengenai pengelolaan BUMDes pernah dilakukan dengan mengundang pengurus Rt/Rw, Dusun dan terhadap organisasi kemasyarakatan di desa, seperti kader PKK, kader Posyandu dan terhadap organisasi Karang Taruna dan masyarakat secara umum.</p>
6.	<p>Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat</p>	<p>Selama ini yang terlihat masih kurangnya ketersediaan dokumen dan informasi hasil</p>

	dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?	dari pengelolaan unit usaha BUMDes sehingga masyarakat dan pihak yang membutuhkan sulit untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan unit usaha yang di kelola oleh BUMDes, dan hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengurus dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	Pemerintah desa telah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui kegiatan usaha BUMDes namun hingga saat ini BUMdes belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena usaha yang dikembangkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga kedepannya diharapkan BUMdes dapat memiliki usaha sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat supaya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan BUMDes.
8.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?	BUMDes telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Hambatan yang ditemui dilapangan yaitu kurang jelas karena kurang menyampaikan laporan keuangan secara jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui penggunaan penyertaan modal yang diperoleh dari pemerintah desa kepada BUMDes. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi

		hambatan yaitu pemerintah desa menginformasikan kepada BUMDes agar supaya memberikan informasi laporan dengan jelas serta akurat kepada masyarakat dan dapat mengetahui penggunaan modal untuk bisa digunakan oleh kebutuhan masyarakat.
9.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?	Walaupun Pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat namun masyarakat masih sulit mengakses bantuan permodalan dalam mengembangkan usahanya.
10.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	Setiap organisasi selalu memiliki peran tersendiri didalam kehidupan bermasyarakat. BUMDes merupakan suatu wadah organisasi desa yang mengembangkan potensi agar bermanfaat bagi masyarakat desa. Dengan adanya badan usaha ini, pemerintah desa dapat dengan mudah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Hasil Rekap Wawancara Bersama Informan 7

Nama Informan : Asep Manarul Hidayat
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia :
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes sehingga dapat memberikan dukungan anggaran untuk pengelolaan usaha yang dimiliki ?	Yang terlihat selama ini para pengurus BUMDes masih kurang familier dalam pergaulan dengan para pelaku usaha di desa, seperti kurang familier dengan para bandar hasil pertanian dan masih kurang familier dengan para pemasok atau distributor barang kelontongan sehingga kesulitan untuk membangun kerjasama jaringan pemasaran terhadap hasil pengelolaan usaha BUMDes, dan hal ini perlu adanya perhatian dari pimpinan desa dan pimpinan BUMDes
2.	Bagaimana pemerintah desa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu pengelolaan BUMDes ?	Partisipasi dari masyarakat memang bukan hal yang mudah dan hal ini perlu menjadi perhatian dari semua pengurus BUMDes agar dapat mengajak dan merangkul semua elemen masyarakat untuk peduli dan turut serta secara langsung dalam pengelolaan BUMDes. Hambatan yang ditemui dilapangan mengenai kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan BUMDes di Desa Nasol sehingga diperlukan adanya perhatian. Upaya yang dilakukan bersama pimpinan BUMDes unruk melakukan interaksi secara

		langsung untuk melakukan pendekatan agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi secara langsung.
3.	Bagaimana pemerintah desa meminta dukungan pihak ketiga dalam membantu permodalan BUMDes sehingga kegiatan usahanya berkembang ?	<p>Perlu adanya keterbukaan dari pemerintah desa dan pimpinan BUMDes mengenai besaran anggaran yang di kucurkan untuk pengelolaan BUMDes terhadap masyarakat desa secara keseluruhan karena menyangkut dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes yang harus dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat desa secara keseluruhan.</p> <p>Hambatan yang terjadi kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa dan pimpinan BUMDes mengenai besaran anggaran.</p> <p>Upaya yang dilakukan yaitu pengurus BUMDes menyusun rencana anggaran biaya untuk pengelolaan unit usaha BUMDes sehingga dapat mengetahui besaran anggaran yang diperlukan untuk usaha BUMDes yang dapat disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa</p>
4.	Bagaimana pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes ?	Memang informasi tentang keberadaan usaha BUMDes sudah lama mendengar dari berbagai sumber di masyarakat desa tetapi yang terasa belum adanya kegiatan formal yang di khusukan untuk mensosialisasikan pengelolaan BUMDes di desa sehingga

		informasi yang ada kurang tersampaikan secara utuh, jelas dan terperinci hal ini dikarenakan kurangnya Pemerintah desa meminta semua komponen ikut terlibat dalam pengelolaan usaha BUMDes.
5.	Bagaimana pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam membantu pengelolaan usaha BUMDes ?	Memang informasi tentang keberadaan usaha BUMDes sudah lama mendengar dari berbagai sumber di masyarakat desa tetapi yang terasa belum adanya kegiatan formal yang di khusukan untuk mensosialisasikan pengelolaan BUMDes di desa sehingga informasi yang ada kurang tersampaikan secara utuh, jelas dan terperinci.
6.	Bagaimana pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes ?	Dari awal memang sudah terlihat kekurang terbukaan dalam pengelolaan usaha BUMDes, hal ini terlihat dari mulai pembentukan BUMDes dan pengurusnya juga hanya melalui penunjukan kepala desa, tanpa ada kesepakatan musyawarah desa terlebih dahulu, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja usaha BUMDes yang ada di Desa.
7.	Bagaimana pemerintah desa membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar ?	mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hambatan yang ditemui dilapangan selama ini BUMDes belum dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena usaha yang dipilihnya belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi

		hambatan yaitu pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus meningkatkan dari segi unit usaha biar nantinya bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
8.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes mempertanggungjawabkan kegiatan usaha secara teknis, efisien, efektif, dan profesional kepada pemerintah desa dan masyarakat ?	<p>Pengelola BUMDes telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyampaikan penggunaan keuangan untuk kegiatan usaha.</p> <p>Kurang jelasnya penyampaian laporan pertanggungjawaban BUMDes kepada masyarakat karena dalam penyampaian pertanggungjawaban tersebut hanya menyampaikan penggunaan keuangan untuk kegiatan usaha namun tidak jelas karena tidak disampaikan dalam bentuk neraca maupun rugi laba yang jelas.</p>
9.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat ?	BUMDes belum dapat menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya kemudahan pinjaman bagi pelaku usaha sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat mengembangkan usahanya.
10.	Bagaimana pemerintah desa meminta BUMDes untuk melakukan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?	BUMDes masih memilih usaha simpan pinjam sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan usahanya padahal kegiatan usaha tersebut penuh resiko sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha BUMDes. Oleh karena itu masyarakat berharap dalam memilih kegiatan usaha sebaiknya BUMDes

Lampiran 8 : Dokumentasi



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen setelah wawancara dengan Kepala Desa



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen setelah wawancara dengan Sekertaris Desa



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen setelah wawancara dengan Direktur Bumdes



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen setelah wawancara dengan Sekretaris Bumdes



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen tasi setelah wawancara dengan Manager Opersional Bumdes



Sumber ; Penelitian 2023

Dokumen setelah wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Sumber; Penelitian 2023

Wawancara bersama Tokoh Masyarakat

Lampiran 9 : Logbook Kegiatan Penelitian

No.	Hari/ Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Catatan	Dokumentasi
1.	Selasa, 02 Mei 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing I	Perbaiki bagian Kerangka Pemikiran	
2.	Senin, 08 Mei 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing I	Perbaiki susunan pengelolaan BUMDes dan siapa saja pengelolanya	
3.	Selasa, 19 September 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing I	Cek kembali tahun berdirinya BUMDes. Acc Bab I dan III bimbingan ke Pembimbing II	
4.	Selasa, 26 September 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing II	Perbaiki latar belakang dan data informan	
5.	Senin, 30 Oktober 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing II	Buat Pedoman Wawancara	
6.	Rabu, 01 November 2023	Bimbingan Bab I dan III dengan Pembimbing II	Acc lanjut kelengkapan Bab IV	
7.	Senin, 13 November 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Nasol		

8.	Selasa, 14 November 2023	Wawancara dengan Sekertaris Desa Nasol		
9.	Selasa, 14 November 2023	Wawancara dengan Direktur BUMDes		
10.	Rabu, 15 November 2023	Wawancara dengan Manager Operasional BUMDes		
11.	Kamis, 16 November 2023	Wawancara dengan Sekretaris BUMDes		
12.	Jumat, 17 November 2023	Wawancara dengan Perwakilan/ Tokoh Masyarakat		

13.	Sabtu, 18 November 2023	Wawancara dengan Perwakilan/ Tokoh Masyarakat		
14.	Rabu, 20 Desember 2023	Bimbingan Bab IV dengan Pembimbing II	Revisi di 4.2 Pembahasan	
15.	Jumat, 22 Desember 2023	Bimbingan dengan Pembimbing II	Lengkapi bagian awal dan lengkapi lampiran-lampiran	
16.	Sabtu, 23 Desember 2023	Bimbingan dengan Pembimbing II	Acc kembali ke Pembimbing I	
17.	Sabtu, 23 Desember 2023	Bimbingan dengan Pembimbing I	Acc Bab I sampai V dan Bagian Awal dan Lampiran lampiran	

Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. DATA PRIBADI**

Nama : Pebri Nur Ibrahim
Tempat /Tanggal Lahir : Ciamis, 15 Pebruari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 3506170116
E-mail : pebrinuribrahim@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Dusun Desa RT 009/RW 003 Desa Nasol
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
Nomor Kontak : 085695748001

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Ar-Rahman : 2004-2005
SD Negeri 4 Nasol : 2005-2011
SMP Negeri 2 Cikoneng : 2011-2014
SMA Negeri 2 Ciamis : 2014-2017
Universitas Galuh : 2017-2023